

MANAJEMEN RISIKO
PERANGKAT DAERAH



INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Penda
Tahun Penilaian
Periode yang Dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

: Pemerintah Kabupaten Pangandaran/Provinsi Jawa Barat
: 2025
: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
: Inspektorat

Sumber Data	Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD		
IKU Renstra OPD		IKU	2025
	1.1	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	19.25
	1.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	78.50
	2.1	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD 2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan SPIP IKU Strategis: 1.1 Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal 1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat 2.1 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi		
	Pangandaran, 12 Desember 2024 Pit. Inspektur  H. AGUS SATRIADI, S.Pt., M.P. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19660902 199601 1 002		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pangandaran/Provinsi Jawa Barat
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai	: Inspektorat

Sumber Data	Renja Inspektorat Tahun 2025
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima
Program Inspektorat (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 60 Laporan
	1.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 42 Laporan
	2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan 2 Rekomendasi
	2.2 Pendampingan dan asistensi 54 Laporan
	3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 93 Persen
	3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34 Dokumen
	3.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 26 Laporan
	3.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Dokumen
	3.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Paket 4 Dokumen
	3.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 93 Persen
	3.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Laporan
	3.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27 Unit
Informasi Lain	-

Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan:

- ### 1.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Kegiatan:

- ## 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
- ### 2.2 Pendampingan dan Asistensi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- | | |
|---|-------------|
| 1.1.1.1 Jumlah laporan Hasil pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan | 53 Laporan |
| 1.1.2 Jumlah Laporan Hasil pengawasan Desa dan Pengawasan Internal | 224 Laporan |
| 1.1.3 Jumlah laporan pengawasan AP/PP yang selesai di Tindaklanjuti | 2 Laporan |

1.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- | | |
|--|------------|
| 1.2.1 Jumlah pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 33 Laporan |
|--|------------|

Pangandaran, 12 Desember 2024

Plt. Inspektur



H. AGUS SATRIADI, S.Pt., M.P

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660902 199601 1 002

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Nama OPD : Inspektorat

Tahun Penilaian : 2025

Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026

Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kategori Risiko	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Tujuan: Meningkatkan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima										
2	Sasaran Strategis OPD: Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD	a. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Risiko Strategis	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop	RSO.24.35.04.01	Inspektur	Kinerja OPD tidak sesuai	Eksternal	Uncontrol	Hasil penilaian AKIP kurang baik	Pemerintah Daerah
		b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat		Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi terbaru							
			Risiko Strategis	SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi	RSO.24.35.04.03	Inspektur	Kurang Kompetensi dan pemahaman terkait pengendalian internal dan tidak adanya pelatihan rutin bagi pegawai dalam pelatihan SPIP	Internal	Control	Penurunan Kinerja Organisasi akibat ketidakefektifan dan ketidakfisienan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Organisasi	Pemerintah Daerah
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP	a. Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Risiko Strategis								

Formulir Kertas Kerja

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nama
OPD : Inspektorat
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 Urusasan
Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Kategori Risiko	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD										
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD										
A.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sasaran: Berkurangnya rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal 3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti										
A.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pelaksanaan	Operasional	Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi	ROO.24.35.04.01	Inspektur Pembantu Wilayah III	Minimnya transparansi dan kerja sama dari pihak yang diawasi	Eksternal	Uncontrol	Hasil pengawasan tidak Akurat	Inspektorat
A.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Pelaksanaan	Operasional	Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi	ROO.24.35.04.02	Inspektur Pembantu Wilayah II	Kurangnya kompetensi dan pemahaman dalam penyediaan data	Eksternal	Uncontrol	Pengawas tidak mendapatkan data yang dibutuhkan dalam waktu yang tepat sehingga menghambat proses pengawasan	Inspektorat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Kategori Risiko	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
A.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Pelaksanaan	Operasional	Data yang tidak akurat atau tidak relevan	ROO.24.35.04.03	Inspektur Pembantu Wilayah III	Tidak memahami terkait dalam mengisi formulir dan salah mengartikan informasi, atau menggunakan teknik pengumpulan data yang tidak sesuai	Laporan Hasil Reviu	Control	Informasi Yang dikumpulkan tidak sesuai fakta, memicu kesalahan analisis	Inspektorat dan Unit Kerja
A.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		Kepatuhan	Tidak dilaksanakan nya prosedur pengawasan secara konsisten	ROO.24.35.04.04	Inspektur Pembantu Wilayah II	Tidak semua tahapan prosedur dipahami dengan baik, sehingga ada langkah yang dilewatkan	Internal	Control	Tidak adanya pengawasan yang konsisten membuka peluang terjadinya penyimpangan atau kecurangan	Inspektorat dan Pemerintahan Desa
A.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Kemitraan	Resistensi atau kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi	ROO.24.35.04.05	Sekretaris	Pihak pimpinan yang kurang mendukung atau tidak memberi contoh komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas	Eksternal	Uncontrol	OPD tidak menindaklanjuti TLHP	OPD terkait
A.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
A.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Pelaksanaan	Kepatuhan	Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran untuk melaksanakan evaluasi secara berkala	ROO.24.35.04.06	Inspektur Pembantu Khusus	Tidak ada evaluasi terhadap efektivitas tindak lanjut rekomendasi	Internal	Control	Pengawasan menjadi tidak efektif karena tindak lanjut dari rekomendasi tidak dievaluasi	Inspektorat
A.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pelaksanaan	Fraud	Monitoring tindak lanjut tidak dilakukan secara berkala	ROO.24.35.04.07	Inspektur Pembantu Khusus	Lemahnya pengawasan dan Kontrol Internal	Eksternal	Control	Meningkatnya Risiko Fraud atau Penyimpangan	Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Kategori Risiko	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
B	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)										
		Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas										
B.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan										
B.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Perencanaan	Reputasi	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	ROO.24.35.04.08	Sekretaris	Tidak dilakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan, risiko, dan potensi masalah selama perencanaan	Internal	Control	Menurunnya kepercayaan stakeholder. Jika proyek gagal atau terjadi kesalahan signifikan, pihak-pihak terkait (investor, manajemen, atau publik) bisa kehilangan kepercayaan	Inspektorat
B.2	Pendampingan dan Asistensi Sasaran : Tersedianya Laporan hasil pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan monev										
B.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan	Operasional	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	ROO.24.35.04.09		Kurangnya analisis kebutuhan dan risiko Tidak dilakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan proyek, potensi masalah, dan tantangan operasional	Internal	Uncontrol	Ketidaksiesuaian hasil dengan tujuan Program atau program tidak berjalan sesuai rencana, menyebabkan hasil akhir tidak memenuhi harapan	Inspektorat dan OPD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab			Dampak	
			Tahap	Kategori Risiko	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
B.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Perencanaan	Operasional	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	ROO.24.35.04.10	Inspektur Pembantu Khusus	Waktu Perencanaan yang Tidak Memadai Tekanan untuk segera menyelesaikan perencanaan mengorbankan proses yang seharusnya mendalam dan terstruktur	Internal	Uncontrol	Peningkatan Risiko Operasional akan berdampak adanya ketidakpatan dalam pengawasan dapat mengakibatkan pelanggaran prosedur, penurunan kualitas pekerjaan	Inspektorat dan OPD
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik 3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur 4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas										
C.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu										
C.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Operasional	Tidak dilaksanakannya prosedur pengawasan secara konsisten.	ROO.24.35.04.11	Inspektur Pembantu Khusus	Terbatasnya tenaga kerja, waktu, atau anggaran menyebabkan pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan	Internal	Uncontrol	Ketidaksesuaian hasil dengan program yang direncanakan, menyebabkan hasil akhir tidak memenuhi harapan	Inspektorat dan OPD

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten Pangandaran
: 2025
: Meningkatkan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima
: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kategori Risiko	Kode Risiko	Analisis Risiko				
				Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Peringkat Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	
I	Risiko Strategis Inspektorat							
1	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop	Risiko Strategis	RSO.24.35.04.01	4	4	4		22
2	Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi terbaru	Risiko Strategis	RSO.24.35.04.02	3	3	11		15
3	SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi	Risiko Strategis	RSO.24.35.04.03	4	4	4		22
II	Risiko Operasional Inspektorat							
1	Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi	Operasional	ROO.24.35.04.01	3	2	14		12
2	Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi	Operasional	ROO.24.35.04.02	2	2	19		7
3	Data yang tidak akurat atau tidak relevan	Operasional	ROO.24.35.04.03	2	3	15		11

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kategori Risiko	Kode Risiko	Analisis Risiko			
				Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Peringkat Risiko
4	Tidak dilaksanakannya prosedur pengawasan secara konsisten	Kepatuhan	ROO.24.35.04.04	2	2	19	7
5	Resistensi atau kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi	Kemitraan	ROO.24.35.04.05	3	3	11	15
6	Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran untuk melaksanakan evaluasi secara berkala	Kepatuhan	ROO.24.35.04.06	4	4	4	22
7	Monitoring tindak lanjut tidak dilakukan secara berkala	Fraud	ROO.24.35.04.07	3	3	11	15
8	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	Reputasi	ROO.24.35.04.08	2	2	19	7
9	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	Operasional	ROO.24.35.04.09	2	2	19	7
10	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	Operasional	ROO.24.35.04.10	2	3	15	11

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Tahun Penilaian : 2025

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima

Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Peringkat Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Strategis Inspektorat						
1	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop	22	RSO.24.35.04.01	4	Inspektur	Kinerja OPD tidak sesuai	Hasil penilaian AKIP kurang baik
2	Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi terbaru	15	RSO.24.35.04.02	11	Inspektur	Kurangnya pemahaman pegawai terkait dengan regulasi	Program Kerja tidak memberikan hasil Maksimal sehingga hasil penilaian Eksternal bisa lebih rendah dari target
3	SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi	22	RSO.24.35.04.03	4	Inspektur	Kurang Kompetensi dan pemahaman terkait pengendalian internal dan ketidakefisienan tidak adanya pelatihan rutin bagi pegawai dalam pelatihan SPIP	Penurunan Kinerja Organisasi akibat ketidakefektifan dan pelaksanaan tugas dan Fungsi dalam Organisasi

No	Risiko Prioritas	Peringkat Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g	h
III	Risiko Operasional Inspektorat						
1	Resistensi atau kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi	15	ROO.24.35.04.05	11	Sekretaris	Pihak pimpinan yang kurang mendukung atau tidak memberi contoh komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas	OPD tidak menindaklanjuti TLHP
2	Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran untuk melaksanakan evaluasi secara berkala	22	ROO.24.35.04.06	4	Inspektur Pembantu Khusus	Tidak ada evaluasi terhadap efektivitas tindak lanjut rekomendasi	Pengawasan menjadi tidak efektif karena tindak lanjut dari rekomendasi tidak dievaluasi
3	Monitoring tindak lanjut tidak dilakukan secara berkala	15	ROO.24.35.04.07	11	Inspektur Pembantu Khusus	Lemahnya pengawasan dan Kontrol Internal	Meningkatnya Risiko Fraud atau Penyimpangan

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Penda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten Pangandaran
: 2025
: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima
: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Strategis Inspektorat						
1	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop	RSO.24.35.04.01	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko	Melakukan kajian lebih dalam dan membuat daftar dokumen yang real terkait pedoman yang telah ada	Inspektur	Tahun 2025
2	Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi terbaru	RSO.24.35.04.02	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat Kebijakan turunan di Kabupaten	Inspektur	Tahun 2025
3	SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi	RSO.24.35.04.03	Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturlas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat Kebijakan turunan di Kabupaten dengan melampirkan contoh dokumen penilaian yang sesuai	Inspektur	Tahun 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
III	Risiko Operasional Inspektorat						
1	Resistensi atau kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi	ROO.24.35.04.05	Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor 700/Kpts.008-Insp/2019 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat kebijakan terkait penanggungjawab pada setiap komponen	Sekretaris	Tahun 2025
2	Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran untuk melaksanakan evaluasi secara berkala	ROO.24.35.04.06	Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor 700/Kpts.008-Insp/2019 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat ruang lingkup penguasan yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia	Inspektur Pembantu Khusus	Tahun 2025
3	Monitoring tindak lanjut tidak dilakukan secara berkala	ROO.24.35.04.07	Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APiP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring terhadap rekomendasi tersebut apakah bisa ditindaklanjuti ataukah masuk ke dalam rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	Inspektur Pembantu Khusus	Tahun 2025

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Tahun Penilaian : 2025

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima

Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan kajian lebih dalam dan membuat daftar dokumen yang real terkait pedoman yang telah ada	Keputusan Inspektur	Sekretaris	Inspektur	Tahun 2025	Akhir tahun 2025	
2	Membuat Kebijakan turunan di Kabupaten	Peraturan Bupati	Inspektur	Bagian Hukum	Tahun 2025	Akhir tahun 2025	
3	Membuat Kebijakan turunan di Kabupaten dengan melampirkan contoh dokumen penilaian yang sesuai	Peraturan Bupati	Inspektur	Bagian Hukum Setda	Tahun 2025	Akhir tahun 2025	
4	Membuat kebijakan terkait penanggunjawab pada setiap komponen	Keputusan Inspektur	Sekretaris	Tim pengawasan	Tahun 2025	Akhir tahun 2025	
5	Membuat ruang lingkup penguasan yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia	Program kerja	Tim pengawasan	Inspektur	Tahun 2025	Akhir tahun 2025	
6	Melakukan monitoring terhadap rekomendasi tersebut apakah bisa ditindaklanjuti ataukah masuk ke dalam rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	Hasil monitoring	Sekretaris	Objek Pemeriksaan	Tahun 2025	Akhir tahun 2025	